

**PERANAN A.H NASUTION DALAM BIDANG MILITER DAN  
POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

**MAKALAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Program Studi Pendidikan Sejarah**



**Oleh:**

**IDA ROSANA**

**NIM : 961314004**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**PERANAN A.H NASUTION DALAM BIDANG MILITER DAN  
POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

Oleh:

**IDA ROSANA**

**NIM : 061314004**

**NIRM : 960051120604120003**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Drs. AA. Padi

Tanggal *3. September 2004*

**PERANAN A.H NASUTION DALAM BIDANG MILITER DAN  
POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**IDA ROSANA**

**NIM : 961314004**

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 15 September 2004  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Tanda Tangan

Ketua Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R.

Sekretaris Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota Drs. A.A. Padi

Anggota Drs. Sutardjo Adisusilo, J.R.

Yogyakarta, 15 September 2004

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Sanata Dharma



Dr. A.M. Slamet Soewandi, M.Pd.

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tugas akhir ini kupersembahkan:

- ◆ Bapak (alm) dan Ibu tercinta, terima kasih atas do'a perhatian dan dukungannya kepada ananda dalam menyelesaikan tugas akhir ini
- ◆ Suamiku tercinta, Sapto yang selalu memberikan dukungan dan perhatian.
- ◆ Adikku tercinta, Osada dan buah hatiku Fany dan Natalia.

### MOTTO

- ♦ Seberat apapun beban dan tugas kita, jika kita mau berusaha dan berdoa pada akhirnya akan mampu menyelesaikannya.



**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

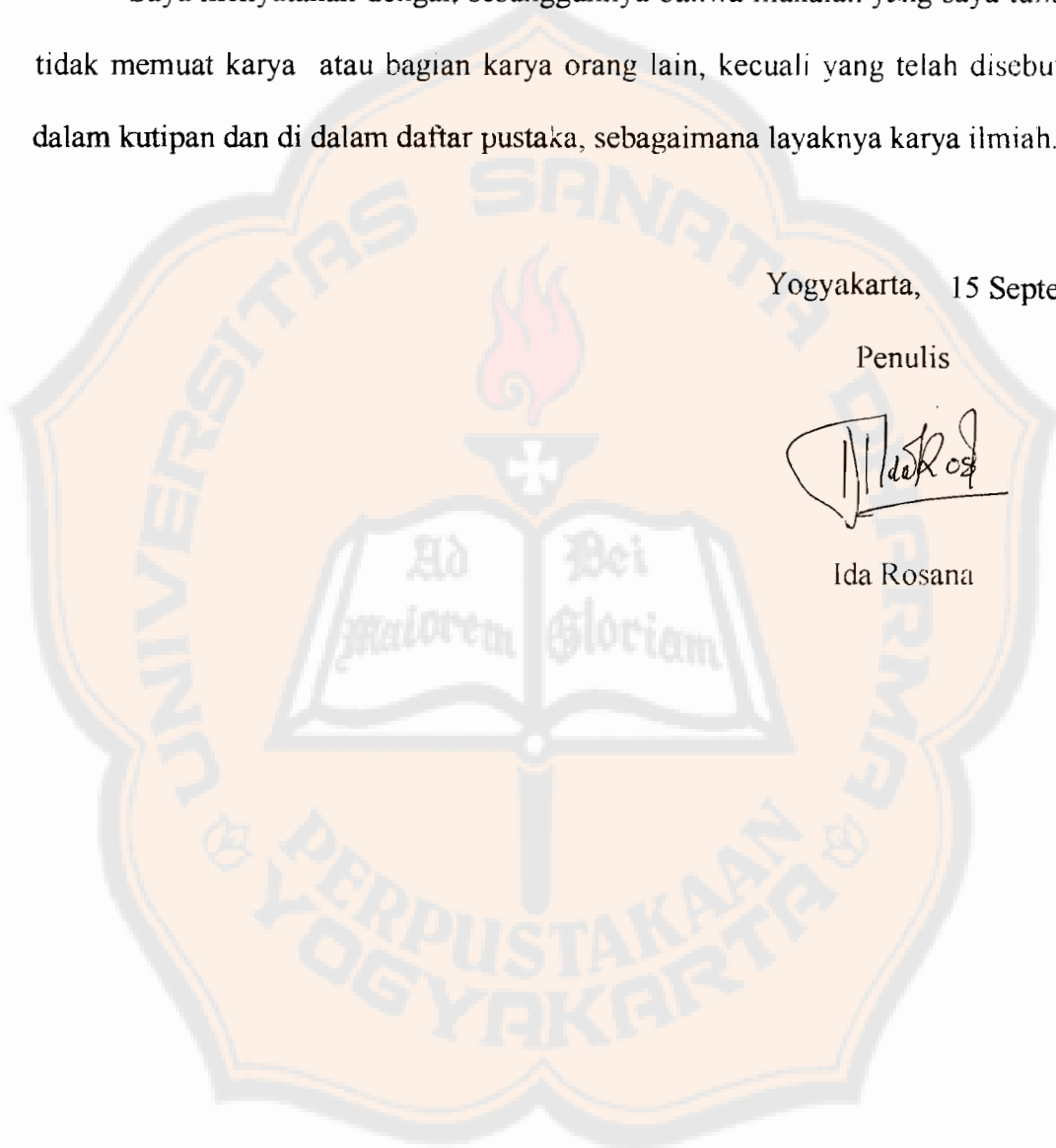
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan di dalam daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 15 September 2004

Penulis



Ida Rosana



**ABSTRAK**

**PERANAN A.H. NASUTION DALAM BIDANG MILITER  
DAN POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

**IDA ROSANA  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2004**

Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui tentang peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952. Dalam makalah ini ada tiga permasalahan pokok yang akan dibahas yaitu pertama bagaimana proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, kedua bagaimana dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952, ketiga bagaimana penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.

Dengan adanya sistem Demokrasi Parlemen maka kabinet yang ada selalu berganti-ganti. Rakyat merasa kecewa dengan sistem pemerintahan yang seperti itu, dimana kabinet yang ada selalu tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Sehingga pada tanggal peristiwa 17 Oktober 1952 rakyat mengadakan demokrasi untuk menuntut presiden agar membubarkan parlemen dan segera diadakan pemilu.

Sebagai dampak dari peristiwa tersebut maka A.H. Nasution pada tanggal peristiwa 5 Desember 1952 dibebastugaskan sebagai KSAD. Namun demikian pada tanggal 27 Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin mengangkat kembali sebagai KSAD menggantikan Bambang Oetoyo.

Dalam peristiwa 17 Oktober 1952, A.H. Nasution mempunyai peranan yang penting dalam percaturan politik Indonesia sebagai anggota Dewan Nasional ia mengusulkan bahwa militer sebagai kekuatan sosial politik bahkan telah melontarkan ide kembali ke UUD 1945. Sehingga dengan demikian A.H. Nasution telah berhasil meletakkan legitimasi konstitusional bagi keterlibatan militer dalam kehidupan politik serta menempatkan posisi dan fungsi politik golongan tentara dan dengan demikian militer, akan menjadi kekuatan politik.

**ABSTRACT**

**NASUTION'S ROLE IN MILITARY AND POLITICS SECTOR  
ON THE INCIDENT OF OCTOBER, 1952**

**IDA ROSANA**

**SANATA DHARMA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA  
2004**

The writing purpose of this paper was to find out the role of A.H. Nasution in the military and political sector on the incident of October 17, 1952. In this paper, there was three main problems which would be discussed, namely the first was how the process on the incident was, the second was how the impact of his role in the military and political sector on it was, and the last was how its solution was.

With the existence of parliamentary democratic system so the existing cabinet always be in turn. People felt disappointment with such government's system, where the existing cabinet was not always be able to do its duty well. So that on the October 17, 1952, people took the democracy to prosecute the president in order to dismiss the parliamentary and hold the election as soon as possible. As the consequence of the incident, A.H. Nasution was freed in duty as KSAD on December 5, 1952. However, on October 27, 1955, the Cabinet of Burhanuddin re-inaugurated him as KSAD replacing Bambang Oetoyo.

On the incident of October 17, 1952, A.H. Nasution had the important role in the political affair of Indonesia as the member of National Board. He proposed that even the military as the social-politics force had given the idea back on the 1945 Constitution (UUD 1945). He had been successful to put the constitutional legitimacy on the military involvement in the political life, the position and the political function of military class and thus the military would be the political force.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini setelah melalui proses yang panjang dan dengan penuh kesabaran serta ketelitian akhirnya dapat dihasilkan penulisan makalah yang berjudul **“Peranan A.H. Nasution dalam Bidang Militer dan Politik pada Peristiwa 17 Oktober 1952”**.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis mengakui bahwa penulisan makalah ini tidak mungkin selesai jika tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Kepala Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Kepala Program Studi Pendidikan Sejarah
4. Bapak Drs. A.A. Padi, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi makalah ini hingga selesai.
5. Bapak (alm) Drs. J.B.M. Mudjihardjo, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan telah mendampingi penulis selama menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberi pelayanan peminjaman buku-buku yang diperlukan penulis bagi penyusunan makalah ini.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Seluruh keluarga yang telah memberi perhatian dan dorongan selama penulis menyelesaikan makalah ini.
8. Seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah Angkatan '96: (alm) Monika Anik, Sr. Veronika, Asti, Wariyanti, Dhanik, Erlin, Erni, Romana, Minda, Bimo. Yudha, Tanyo dan Beni, yang telah memberi perhatian dan persahabatan selama penulis menyelesaikan tugas belajar.
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

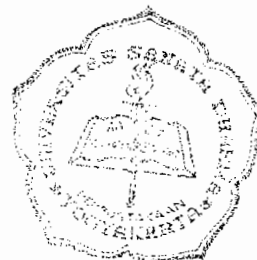
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan baik pemikiran, kritik maupun saran yang bersifat membangun. Semoga makalah ini berguna bagi siapa saja.

Yogyakarta, 2004

Penulis

**DAFTAR ISI**

|                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                    | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                               | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>                              | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                           | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>                       | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                          | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                        | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>ix-x</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                              | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....                                      | 12          |
| C. Tujuan Penulisan .....                                    | 12          |
| D. Manfaat Penulisan .....                                   | 13          |
| E. Sistematika Penulisan.....                                | 13          |
| <b>BAB II PROSES TERJADINYA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952 ..</b> | <b>15</b>   |
| A. Perdebatan-perdebatan di Parlemen .....                   | 15          |
| B. Demonstrasi Anti-Parlemen.....                            | 19          |



|                |                                                    |           |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>DAMPAK DARI PERANAN A.H. NASUTION</b>           |           |
|                | <b>DALAM BIDANG MILITER DAN POLITIK</b>            |           |
|                | <b>PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952 .....</b>        | <b>22</b> |
|                | A. Dampak dalam Bidang Militer .....               | 22        |
|                | B. Dampak dalam Bidang Politik.....                | 29        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENYELESAIAN PERISTIWA 17 OKTOBER 1952.....</b> | <b>35</b> |
| <b>BAB V</b>   | <b>KESIMPULAN .....</b>                            | <b>38</b> |
|                | <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                        | <b>40</b> |
|                | <b>LAMPIRAN.....</b>                               | <b>41</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Abdul Haris Nasution merupakan salah satu tokoh, pejuang pahlawan, dan sering disebut sebagai Bapak keamanan, gerilya, kekaryaan ABRI, dan Bapak Hansip. A.H. Nasution lahir di kampung Hutu-Pangkut, distrik mandailing dekat perbatasan Sumatera Utara - Sumatera Barat, pada tanggal 3 Desember 1918.<sup>1</sup> Pada tahun 1931, A.H. Nasution meninggalkan kampung halamannya karena sekolah HIS (Hollands inlandse School) di Kotanopan. Kemudian tahun 1932 A.H. Nasution melanjutkan sekolah Raja" (HIK) di Bukittinggi, yaitu sekolah Guru.<sup>2</sup> Pada tahun 1938 A.H. Nasution sebagai seorang pemuda yang memiliki ijazah AMS "B" di Jakarta. Karena dengan memiliki ijazah tersebut memberi kesempatan untuk ikut melamar ke pendidikan milisi dan akademi Militer di Bandung.<sup>3</sup>

Setelah itu pada zaman Jepang A.H. Nasution sebagai pemimpin Barisan Pemuda dan Wakil komandan Batalyon Pelopor, dan sebentar menjadi wartawan di Bandung. Pada masa kemerdekaan, pada tahun 1945 menjabat sebagai kepala staf komandan I di Jawa Barat, panglima Divisi III TKR (Pariangan), Panglima Divisi Siliwangi, Panglima pertahanan Jawa Barat dalam Gerilya I, Wakil Panglima Besar / Kepala Staf Operasi MBAP (di

---

<sup>1</sup> A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda, Jilid I*, Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.20

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 40

Yogyakarta), Panglima Komando Jawa dalam gerilya II, KSAD di Jakarta, mendirikan Seskoad, terpilih untuk konstituante di Jawa tengah.

Tahun 1955 - 1962 menjadi KSAD yang ke - 2 kalinya, mendirikan Legium Veteran RI, BKS Pemuda Militer, Tani Militer menjadi anggota Dewan Nasional, mendirikan Hansip. Resimen Mahasiswa.

Kemudian pada tahun 1961 - 1962 menjabat sebagai panglima Besar Koti (pembebasan Irian Barat), Perasehat Majelis Mahasiswa Indonesia, sesepuh Resimen Mahasiswa Mulawarman dan Mahajaya, ketua MPRS.<sup>4</sup>

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federasi dirasakan oleh para pemimpin negara tidak sesuai dengan cita-cita semula sebagaimana terkandung di dalam UUD 1945, yaitu bentuk "Kesatuan". Kemudian pemimpin-pemimpin RIS, terutama dari negara Indonesia melancarkan gerakan tersebut mendapat dukungan luas dari seluruh negara bagian, tidak saja dari RI, tetapi juga dari negara-negara yang dahulu termasuk BFO. Pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS kembali ke bentuk kesatuan lagi, tetapi mulai 1950 ini Indonesia tidak memakai UUD 1945. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950, itu menggunakan sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UUD-S 1950 yang menggantikan konstitusi RIS.

Dalam transformasi dari bentuk federal ke bentuk kesatuan timbul beberapa usaha ekstrim bersenjata yang mempertahankan bentuk federal, yaitu berupa

---

<sup>4</sup> Soebagijo I.N, *Wilopo 70 Tahun*, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hlm. 352

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

beberapa pemberontakan dan percobaan kudeta di Bandung, Jakarta, Makassar dan Maluku.<sup>5</sup>

Dalam menanggulangi kejadian itu, besar sekali peranan TNI yang dipimpin oleh KSAD, Kolonel A. H. Nasution, sehingga memperlancar usaha dan gerakan yang menuju kebertuk "Kesatuan".

Dalam proses pembubaran sistem itu, Angkatan Darat telah memainkan peran penting dengan menggunakan kemampuan militer dan politiknya. Baik para pemimpin militer maupun pemimpin sipil pada waktu itu tampaknya tidak menyadari kenyataan bahwa penggunaan tentara dalam operasi-operasi keamanan dalam negeri melibatkan mereka dalam membuat pilihan-pilihan politik, dan dengan demikian maka tak terhindarkan lagi mereka memperoleh, baik kawan politik maupun musuh politik. Dengan kata lain, sebuah tentara yang diberi tugas memelihara keamanan dalam negeri secara besar-besaran dan semi permanen, secara praktisnya terlibat dalam percaturan politik dalam negeri, dalam hal ini angkatan darat telah memainkan peran yang boleh dikatakan menentukan dalam menetapkan struktur konstitusional Indonesia.<sup>6</sup>

Fungsi-fungsi keamanan dalam negeri yang dilaksanakan terus-menerus selama beberapa waktu dalam keadaan *Steat van Oorlog en Beleg* (SOB) yakni keadaan perang dan darurat perang yang diumumkan pemerintah akan menyeret Angkatan Darat kian jauh dalam kegiatan politik di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Muhaimin, A. Yahya, *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Gajah Mada University Pres, Yogyakarta

<sup>6</sup> ULF. Sundhaussen "Politik Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI". LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. 98

Indonesia sejak kembali ke bentuk kesatuan pada tanggal 19 Mei 1950 memakai sistem pemerintahan yang lazim disebut “Sistem Demokrasi Liberal” atau lebih tepatnya disebut “Sistem Demokrasi Parlementer”.

Jadi dalam sistem ini kekuasaan politik dan decision maker adalah partai politik raja. Presiden dan kaum militer merupakan kekuatan politik yang sifatnya extra parlementer dengan kekuasaannya yang terbatas sekali. Kalau mengingat peranan Presiden dan kaum militer dalam menegakkan kemerdekaan yang besar, maka konsekuensi daripada sistem pemerintahan ini dari satu segi tidak memuaskan pihak militer, yang justru merasa dirinya sebagai shareholders dan pemegang panji dalam masa-masa menegakkan Republik Indonesia.

Pada waktu Indonesia memakai sistem pemerintahan demokrasi parlementer, kabinet yang ada selalu berganti-ganti. Setiap kabinet yang ada pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pada masa kabinet Wilopo, yaitu yang menggantikan Kabinet Sukiman, konflik antara kaum politisi (sipil) dengan militer mulai timbul lagi yaitu dengan terjadinya suatu peristiwa yang biasa disebut “Peristiwa 17 Oktober 1952”. Program kabinet Wilopo didalam banyak hal tidak berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu Hatta (masa RIS), Natsir, dan Sukiman. Oleh karena itu selaras dengan kondisi negara, Menteri Keuangan Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang menjabat sebagai menteri perdagangan dan perindustrian dalam Kabinet Natsir, melakukan penghematan Anggaran

Belanja Negara untuk segala bidang termasuk bidang kemiliteran. Ini berarti dilakukannya rasionalisasi kembali, juga rasionalisasi dalam tubuh Angkatan perang yang pelaksanaannya dilakukan dibawah tanggung jawab Menteri Pertahanan, Sultan Hamengku Buwono IX, selain itu ia dalam Kabinet Hatta (RIS) telah melakukan serangkaian reorganisasi dan rasionalisasi dalam bidang militer, yaitu dalam rangka menjadikan kemiliteran Indonesia yang tadinya bersifat heterogen agar menjadi tentara yang punya satu komando sebagaimana lazimnya dalam suatu negara modern.

Pada masa kabinet ini, rencana pimpinan TNI untuk menjadikan tentara Indonesia sebagai tentara profesional dan “to transform the existing army into highly trained ‘care’ army” (“untuk merubah tentara yang sekarang ada menjadi tentara ‘inti’ yang sangat terlatih”) dijadikan terus. Dan rencana ini disetujui serta didukung oleh menteri Hamengku Buwono IX. Oleh karena alokasi anggaran belanjanya yang sangat terbatas, maka perlu pertengahan tahun 1952 pimpinan TNI-AD memutuskan untuk memulai melaksanakan demobilisasi sebagai konsekuensi reorganisasi dan rasionalisasi militer tersebut.<sup>7</sup>

Tetapi program dari pimpinan TNI tersebut di atas tidak disetujui oleh beberapa kalangan TNI sendiri, terutama oleh anggota-anggota tentara yang berasal dari bekas-bekas tentara PETA dan Laskar yang begitu dekat dengan Presiden Soekarno karena perasaan “bapakisme” mereka.

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 70

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi di istana Presiden. Para demonstran pada pokoknya kepada Presiden menuntut supaya Presiden membubarkan DPR sementara yang ada dan kemudian segera mengadakan pemilihan umum. Dengan keahliannya sebagai orator Presiden Soekarno berusaha meredakan para demonstran dan menjanjikan akan segera diadakan pemilihan umum, akan tetapi Presiden menolak untuk membubarkan parlemen.<sup>8</sup>

Setelah selesai menghadapi para demonstran, kemudian Presiden menerima dua kelompok perwira TNI yang semuanya berjumlah 17 perwira yang diantaranya lima perwira dari tujuh komandan teritorial seluruh Indonesia.

Untuk menghadapi para militer ini Presiden segera memanggil Mohammad Hatta, Wilopo, Ketua pembantu Presiden dan Mr. Tambunan selaku ketua DPRS. Dalam pertemuan tersebut, delegasi *top leaders* TNI itu antara lain menyatakan bahwa DPR yang ada itu tidaklah representatif dan merupakan sumber ketidakstabilan politik sehingga menyebabkan kabinet-kabinet tidak bisa melaksanakan program-programnya dengan waktu yang cukup, dan bahwa intervensi yang langsung dilakukan oleh DPR terhadap politik TNI sangatlah membahayakan negara. Oleh karena itu mereka menuntut agar Presiden segera membubarkan parlemen tersebut dan membentuknya kembali sesuai dengan keinginan rakyat. Dan bahkan lebih jauh dari itu pimpinan TNI mendesak Presiden untuk mengganti Kabinet yang ada dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Muhaimin. hlm. 73.

pemerintahan triumvierta oleh Soekarno, Hatta dan Hamengku Buwono IX. Pada waktu itu presiden Soekarno tidak mau memenuhi keinginan pihak militer sampai pertemuan itu di bubarkan dan tetap tidak ada penyelesaian.

Dengan adanya peristiwa 17 Oktober 1952 ini dapat di katakan bahwa sejak saat itu gagal *Manoever politik* yang di usulkan oleh TNI. Dengan adanya kegagalan *politik manoever* menyebabkan terpecahnya perwira-perwira yang ada dalam tubuh TNI dan pimpinan TNI sendiri justru mengklaim bahwa hal tersebut sebagai penyebabnya, sedangkan dalam tubuh TNI sendiri terpecah antara kelompok yang menginginkan TNI atas dasar profesionalisme dengan kelompok TNI yang menentang profesionalisme yang merupakan penggerak dari kejadian tersebut dan hal ini menunjukan tidak adanya kesatuan arah. Sebagai akibat dari kejadian ini pada tanggal 5 Desember 1952 Kolonel A.H Nasution disebar tugaskan oleh pemerintah dan berhenti sebagai KSAD dan demikian juga beberapa perwira lainnya yang “pro-17 Oktober” mendapatkan sanksi yang sama.

Penyelesaian peristiwa 17 Oktober ternyata berlarut-larut sampai 28 lamanya. Suasana pro dan kontra masih terlihat. KSAD yang baru, Kolonel Bambang Sugeng tidak berhasil mengatasi.

Akhirnya para perwira TNI Angkatan Darat sepakat bahwa krisis ini harus segera diakhiri atau di selesaikan.

Untuk beberapa lama pemerintahan Ali Sastromijoyo (pengganti Kabinet Wilopo) dapat mempertahankan *status quo* di dalam tubuh TNI. Akan tetapi tanggal 24 juli 1955, Ali Sastromijoyo menyerahkan mandatnya kepada

pejabat Presiden Muhammad Hatta karena tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut mekanisme sistem politik yang ada, karena kabinet Ali Sastromijoyo jatuh karena adanya persaingan partai-partai politik dan perlemen yang ada. Sebenarnya momentum jatuhnya kabinet Ali Sastromijoyo adalah adanya tekanan dari angkatan Darat dan sejak saat itu TNI-AD betul-betul *defakto* yang merupakan suatu kekuatan politik yang mulai aktif memainkan perannya dalam kancah politik.

Pada bulan Agustus 1955 terbentuklah kabinet baru dengan perdana menteri Burhanudin Harahap. Pada bulan ini juga kabinet menghentikan kolonel Bambang Oetoyo sebagai KSAD dan mencabut kembali pemecatan terhadap kolonel Zulkifli Lubis.

Pada tanggal 27 Oktober 1955, kabinet Burharudin Harahap memutuskan untuk mengangkat kolonel A.H Nasution sebagai KSAD baru dan empat hari kemudian Presiden Soekarno menandatangani pengangkatan itu dengan memberi pangkat Mayor Jendral.

Di dalam penulisan ini menggunakan sumber tertulis yang berupa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis. Sumber utama yang dipakai dalam penulisan adalah buku yang berjudul *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, karangan Muhaimin A. Yahya, terbitan tahun 1982. buku ini berisi tentang peranan Tentara Nasional Indonesia sebagai kaum militer ikut terjun memainkan peranan politiknya sampai kemudian memegang posisi yang dominan, sampai perkembangan tersebut berlangsung dari tahun

1945-1966. Selain itu juga berisi tentang figur politik Jenderal A.H. Nasution yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan untuk mengikutsertakan kaum militer terjun atau mempunyai peranan penting dalam bidang politik.

Selanjutnya buku yang berjudul *Pejuang dan Prajurit*, karangan Nugroho Notosusanto, terbitan tahun 1984.

Buku ini berisi tentang terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang pada intinya adalah pergulatan antara kekuatan yang menghendaki posisi otonomi TNI-AD yang kelak berkembang menjadi fungsi sosial-politik ABRI melawan mereka yang menganut paham supremasi sipil terhadap militer.

Di samping buku-buku sebagai acuan pokok, juga menggunakan buku-buku lain yang membantu membahas permasalahan yang ada antara lain: *Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba I, Jilid 3*, karangan A.H. Nasution, terbitan tahun 1983. Selanjutnya buku yang berjudul *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, karangan A.H. Nasution terbitan tahun 1966. Selanjutnya buku yang berjudul *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda, Jilid 1*, Karangan A.H. Nasution diterbitkan tahun 1982. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, terbitan tahun 1990. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, karangan Ozon terbitan tahun 1990. *Nasution Dwi fungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Reformasi Politik*, karangan Hendri Supriyatmono, terbitan tahun 1994. Selanjutnya buku yang berjudul *Wilopo 70 th*, karangan Soebagijo I.N, terbitan tahun 1979 dan masih banyak lagi sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan. Sumber-sumber lain tentu saja yang

berkaitan dengan topik dan dapat membantu membahas permasalahan yang ada.

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan, perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah peranan, peristiwa 17 Oktober 1952, militer dan politik. Penjelasan beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah.

Konsep peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaku dalam suatu peristiwa, dalam hal ini peran menunjukkan tokoh yang melakukan suatu peristiwa, sedangkan peranan adalah sebagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>9</sup>

A.H. Nasution merupakan salah satu tokoh atau pelaku dalam perkembangan untuk mengikutsertakan TNI-AD dalam menjaga kestabilan bangsa serta ikut berkiprah dalam bidang militer dan politik.

Dalam hal peranan ini, penulis memberi batasan peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952. A.H. Nasution sebagai kepala staf Angkatan Darat adalah yang bertanggung jawab penuh atas tugasnya dalam memimpin dan mengamankan bangsa.

Konsep peristiwa 17 Oktober 1952 adalah pergulatan antara kekuatan yang menghendaki posisi otonom TNI Angkatan Darat yang kelal berkembang menjadi fungsi sosial-politik ABRI melawan mereka yang menganut paham supremasi sipil terhadap militer. Lantarannya adalah penghinaan dan campur

---

<sup>9</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta, 1990, hlm. 667

tangan kaum politisi dengan bantuan oknum-oknum yang mereka bina dalam tubuh TNI.<sup>10</sup>

Konsep militer dari kata Perancis, *l'armee de la terre*, yang artinya balatentara darat, semula bermakna tentara darat atau angkatan darat.

Tetapi kini militer berarti segala hal yang bersangkutan dengan angkatan bersenjata suatu negara; komunitas militer pada umumnya; pertahanan dan keamanan suatu negara.<sup>11</sup>

Dalam hal ini tujuan dari pada militer adalah untuk memulihkan keamanan berarti tidak hanya mempergunakan alat-alat kekuasaan, tetapi juga kegiatan dengan mengurangi sebab-sebab kesulitan politik, sosial dan ekonomi. Penyempurnaan organisasi pemerintah, perbaikan kebijaksanaan adalah usaha-usaha penting untuk memulihkan dan mempertahankan keamanan dalam hal ini untuk memulihkan keamanan pada saat peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi.

Konsep politik, filsafat adalah disiplin ilmu yang khusus membahas hakekat masyarakat dan negara, serta pengaturan hubungan keduanya. Jadi, filsafat politik mempersoalkan istilah, pernyataan-pernyataan, serta argumentasi-argumentasi ilmu dan ideologi politik.

Filsafat politik adalah salah satu cabang etika sosial atau kemasyarakatan, sedangkan etika sebagai cabang ilmu filsafat khusus

---

<sup>10</sup> Nugroho Notosusanto, *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan : Jakarta, 1984, hlm 72

<sup>11</sup> Ozon, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta : PT. Cipta Pustaka, 1990, hlm 510

membahas moral.<sup>12</sup> Dalam hal ini A.H. Nasution sebagai KSAD telah mengikutsertakan TNI-AD terjun dalam bidang politik.

Yang seharusnya TNI-AD melaksanakan fungsinya sehari-hari untuk menjaga keamanan negara dan ketertiban masyarakat sebagai mestinya yang tujuannya untuk usaha kabinet menyelesaikan peristiwa 17 Oktober 1952 namun kenyataannya ikut terjun dalam kancah persatuan politik.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka untuk mengetahui lebih jelas mengenai peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952, maka muncul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya peristiwa 17 oktober 1952?
2. Bagaimana dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952?
3. Bagaimana penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sesuai permasalahan di atas maka tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa mengenai proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 320.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi berbagai manfaat antara lain.

##### **1. Bagi Penulis**

Penulisan-penulisan ini pada intinya dapat menambah pengetahuan baru khususnya tentang peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik para peristiwa 17 Oktober 1952.

##### **2. Bagi Universitas Sanata Dharma**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah, melengkapi dan memperkaya karya ilmiah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama tentang peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.

##### **3. Bagi Mahasiswa Jurusan Sejarah**

Penulisan ini diharapkan dapat menambah, memperluas cakrawala dan pengetahuan khususnya tentang sejarah Indonesia.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan tentang "Peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952" ini terjadi dari 5 bab :

Bab I : Berupa pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Berupa penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.

Bab III : Berupa penjelasan tentang dampak dari Peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.

Bab IV : Berupa penjelasan tentang penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952

Bab V : Kesimpulan, berisi jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan.

Demikianlah pendahuluan dalam penulisan ini. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa melalui penulisan ini, penulis ingin membuat suatu tulisan mengenai *Peranan A.H. Nasution Dalam Bidang Militer dan Politik Pada Peristiwa 17 Oktober 1952*.

Untuk pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

## **BAB II**

### **PROSES TERJADINYA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

#### **A. Perdebatan-perdebatan di Parlemen**

Pada awal tahun 1952, ketika Kolonel Bambang Supeno secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya mengenai keadaan dalam tubuh tentara. Sebagai salah satu dari perwira didikan Jepang yang menduduki jabatan-jabatan teras militer sejak masa-masa awal revolusi, ia mengecam keras kebijakan baru militer yang digariskan oleh Menteri Pertahanan, Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta. Ia menuduh bahwa semangat revolusi 1945 sudah lenap dalam tubuh militer.

Tuduhan-tuduhan ini harus dilihat dengan mengingat kritik-kritik yang telah dilontarkan terhadap Bambang Supeno beserta Sekolah Perwira Tjandra Dimuka yang dipimpinnya. Dikatakan bahwa di sekolah itu yang berlaku adalah semangat militer gaya Jepang, yang menekankan misi ideologis dan politis tentara. Semangat semacam ini dikritik oleh para tokoh militer profesional dan non-politisi, Bambang Supeno mengadukan persoalan ini langsung kepada Presiden Soekarno. Kabar tentang pertemuan ini sampai ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta.

Pada 12 Juli, Bambang Supeno ditanya dan ditegur dalam sebuah rapat para perwira tinggi. Menyebut rapat ini merupakan pengadilan, ia menyatakan kasusnya di luar kewenangan para atasannya dan ia dilaporkan meninggalkan rapat tersebut. Setelah pengucuran ini, ia memaparkan kritik-kritiknya langsung ke Seksi Pertahanan Parlemen dan Kabinet, dalam serangkaian surat yang sampai sekarang belum diumumkan. Pada tanggal 16 Juli ia dipecat dari

jabatannya karena menentang para atasannya dan karena berupaya membenuk kelompok oposisi dalam korps perwira. Pemecatan tersebut telah ditandatangani oleh Hamengku Buwono pada tanggal 29 Juli.<sup>13</sup>

Tak sampai sepekan kemudian, menurut koran Jakarta *Merdeka*, masalah ini dibahas dalam Kabinet. Dilaporkan bahwa Sultan mau mengemban seluruh tanggungjawab dari tindakan kementriannya, tetapi ia tidak akan menerima campur tangan Presiden. Konflik tajam antara Hamengku Buwono IX dan Presiden Soekarno, mengenai kasus Bambang Supeno dan soal-soal yang dituduhkannya dalam surat-suratnya. Pada 28 Juli, Sultan mengaku "Tidak ada pertentangan dengan Presiden, meskipun ada perbedaan pendapat".

Tampaknya jelas bahwa Presiden tidak terlibat langsung, atau secara terbuka, dalam kericuan antara Parlemen dan Angkatan Darat, namun demikian namanya terus disebut oleh para penentang Sultan dan pimpinan Angkatan Darat.

Surat Bambang Supeno ditanggapi langsung dan eksplosif oleh parlemen. Mula-mula dibahas dalam Seksi Pertahanan, kemudian dibawa ke sidang pleno pada tanggal 28, 29 dan 30 Juli. Dalam sidang terbuka itu, yang baru berakhir pada tanggal 16 Oktober, sikap parlemen yang sangat antusias terlihat oleh pandangan publik. Surat tersebut membuat kegemparan karena ia menyentuh beberapa banyak isu nyata. Isu pertama ialah reorganisasi Angkatan Darat. Rencana reorganisasi Kementrian, yang sangat merisaukan Kolonel Bambang Supeno, menghendaki rasionalisasi organisasi tentara dan pengurangan bertahap personilnya, dari 200.000 menjadi 100.000 orang.

---

<sup>13</sup>. Boyd. R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI, Jakarta, 1993, hlm.5.

Rencana itu juga menggariskan supaya misi militer Belanda yang kecil, memberi saran teknis kemiliteran sejak penyerahan kedaulatan pada Desember 1949 tetap dipertahankan. Bagi unsur-unsur nasionalis tertentu di parlemen yang bereaksi keras, rencana itu tampak bukan hanya sebagai serangan atas semangat dan personil tentara revolusi, tapi juga sebagai sikap tunduk pada pengaruh-pengaruh Barat. Isu kedua adalah yurisdiksi parlemen-Angkatan. Bahwa pelaksanaan pengembangan Angkatan Bersenjata dapat berlangsung hanya atas dasar peraturan-peraturan yang dibuat oleh Parlemen. Selama 3 tahun sidang-sidang parlemen tidak pernah menghasilkan peraturan-peraturan itu, tetapi pernyataan ini tidak menggeser pendirian Seksi Pertahanan. Kasus Bambang Supeno memberi para anggotanya kesempatan menyerang bukan hanya rencana Kementerian Pertahanan, tapi juga kewenangannya untuk menangani soal-soal kedisiplinan sebelum prosedur yang lazim disahkan oleh Parlemen. Anggota DPR Pitor dari Partai Indonesia Raya menardaskan bahwa kasus Bambang Supeno dapat ditinjau oleh sebuah pengadilan darurat yang terdiri dari Presiden, anggota-anggota tertentu kabinet dan beberapa wakil dari Angkatan Darat.<sup>14</sup>

Pada tanggal 28 Juli 1952 Parlemen membuka perdebatan mengenai persoalan-persoalan kementerian pertahanan dan Angkatan Perang yang dipusatkan pada persoalan-persoalan intern Angkatan Darat. Dalam debat yang berlangsung selama beberapa minggu, TNI Angkatan Darat dibeberkan di depan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8.

umum yang menimbulkan amarah yang amat besar di kalangan TNI dan membangkitkan sentimen yang hebat anti politisi.

Ketegangan antara TNI-AD dan Parlemen semakin berkembang dengan diajukannya tiga mosi selama perdebatan-perdebatan di parlemen.<sup>15</sup>

1. Mosi Zainul Baharuddin dan Ir. Sukirman (PKI)

Yang mendesak pemerintah agar diadakan peninjauan kembali struktur organisasi kementerian pertahanan dan secepat mungkin dibentuk Undang-undang Pertahanan untuk mengatur lebih lanjut kedudukan hukum setiap Angkatan Perang. Mosi ini merupakan ketidakpercayaan terhadap kebijaksanaan Menteri Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX.

2. Mosi I.J. Kasimo (Katholik) dan M. Natsir (Masyumi)

Yang mendesak agar segera diakhirinya penggunaan Misi Militer Belanda (MMB) dan dibentuknya panitia untuk mengatur susunan baru organisasi Angkatan Perang.

3. Mosi Manai Sophiaan

Berdasarkan petunjuk ketua DFP Partainya mengajukan mosinya yang berisi:

- Mendesak kepada pemerintah agar segera mengakhiri penggunaan MMB
- Mengadakan reorganisasi dan mutasi pimpinan Angkatan Perang dan Kementerian Pertahanan.
- Menganggap perlu disusun Undang-undang Pokok Pertahanan.

---

<sup>15</sup> Nugroho Notosusanto. *Pejuang dan Prajurit*, Sinar Harapan, Anggota IKAPI, Jakarta, 1984, hlm.68.

Karena persoalan intern TNI-AD dibebankan dalam persidangan DPRS, maka timbul ketegangan yang menimbulkan kemarahan, mosi Manai Sophian dianggap telah melampaui batas kekuasaan DPR. TNI-AD menganggap bahwa DPRS telah melakukan intervensi politik ke dalam tubuh TNI-AD. Segera untuk mengatasi tindakan untuk mengatasi perkembangan keadaan yang terjadi, apalagi setelah muncul rasa ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya dari kalangan perwira tertentu di tubuh Angkatan Darat dan lantas menempuh cara-cara yang dinilai melanggar disiplin militer dan hirarki komando. Serangkaian pertemuan segera diselenggarakan dengan korps perwira dan para panglima militer se Indonesia.<sup>16</sup>

#### **B. Demonstrasi Anti-Parlemen**

Pada tanggal 17 Oktober 1952, suatu demonstrasi yang mengejutkan melanda Jakarta, dilakukan oleh sekitar 5.000 orang dan kemudian bertambah sampai mencapai 30.000 orang. Para demonstran bergerak menuju ke Istana Presiden untuk menyampaikan tuntutan mereka.

Para demonstran menuntut kepada Presiden supaya presiden membubarkan parlemen dan kemudian segera mengadakan pemilu. Dengan keahliannya sebagai seorang orator, Presiden berbicara sekaligus meredakan dan menyebarkan demonstran. Presiden menjanjikan diadakannya Pemilu secepat mungkin, tetapi dia menolak membubarkan Parlemen sebab kata Presiden hal itu berarti akan menjadikannya seorang diktator. Dan yang berdemonstrasi hanya rakyat Jakarta yang dianggap tidak mewakili seluruh rakyat Indonesia. Aksi demonstrasi di

---

<sup>16</sup> A.H Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas : Masa Pancaroba Pertama*, Jilid 3, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm.165.

organisir oleh Kolonel dr. Mustofa dan komandan Garnisun Jakarta, Mayor Kosasih, sementara itu gerakan pasukan dikoordinir oleh Letkol Idris.<sup>17</sup>

Selesai menghadapi para demonstran, presiden menerima dua kelompok perwira TNI yang semuanya berjumlah 17 perwira dan termasuk di dalamnya 5 orang perwira dari 7 komandan teritorial dari seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Presiden bertambah kuat. Namun demikian Presiden Soekarno memanggil Mohamad Hatta, Wilopo, ketua pembantu Presiden dan Mr. Tambunan selaku ketua DPRS. Dalam pertemuan tersebut delegasi *Top Leader* TNI menyatakan bahwa DPRS yang ada sudah tidak *representatif* dan merupakan sumber ketidakstabilan politik, sehingga menyebabkan kabinet-kabinet tidak bisa melaksanakan program-programnya dengan waktu yang cukup dan intervensi yang dilakukan secara langsung oleh DPRS terhadap *policy* TNI sangat membahayakan keadaan negara. Maka dari itu mereka menyatakan kepada Presiden agar segera mengatasi jalan buntu dalam tubuh parlemen dengan membubarkan parlemen tersebut dan membentuk kembali parlemen secepat mungkin yang sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu pimpinan TNI juga mendesak Presiden untuk menggantikan kabinet yang ada dengan pemerintahan *triumvirate* oleh Soekarno-Hatta dan Hamengku Buwono IX.<sup>18</sup>

Peristiwa 17 Oktober ini, walaupun tidak sampai hanya di situ, akan tetapi berekor panjang di kemudian hari. Namun demikian dapat dikatakan sejak saat itu gagallah *monoever politik* TNI itu. Tetapi di samping itu, kegagalan *political monoever* TNI itu juga disebabkan terpecahnya perwira dan pimpinan

<sup>17</sup> Muhaimin A. Yahya, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1982, hlm. 73.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

TNI dan kemungkinan hal ini justru sebagai penyebab utamanya. Mereka terpecah antara kelompok yang menginginkan TNI atas dasar profesionalisme dengan kelompok yang menentang profesionalisme. Bahkan dalam peristiwa itu sendiri pimpinan dan perwira TNI yang mempertahankan profesionalisme adalah sebagai penggerak dari pada kejadian tersebut yang menunjukkan tidak adanya kesatuan arah. Sebagai contoh, pada saat KSAD A.N Nasution yang begitu antipati dan benci terhadap parlemen dan cenderung pada pandangan pemerintahan yang otoriter serta militerisme dan sementara KSAP Majen Simatupang menentang pemerintahan diktator militer. Sehingga para perwira yang mengikuti gerakan kedua tokoh TNI tersebut juga mempunyai tujuan dan pemikiran yang simpang siur berkaitan dengan peristiwa tersebut.<sup>19</sup>

Peristiwa 17 Oktober pada pokoknya adalah pergulatan antara kekuatan yang menghendaki posisi otonom TNI-AD yang kelak berkembang menjadi fungsi sosial politik ABRI melawan mereka yang menganut paham supremasi sipil terhadap militer. Penyebabnya adalah penghinaan dan campur tangan kaum politisi dengan bantuan oknum-oknum yang mereka bina di dalam tubuh TNI.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.75.

### **BAB III**

#### **DAMPAK DARI PERANAN A. H NASUTION DALAM BIDANG MILITER DAN POLITIK PADA PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

##### **A. Dampak dalam Bidang Militer**

Sebagai dampak dari peristiwa 17 Oktober 1952, pada tanggal 5 Desember 1952 Kolonel A.H. Nasution dibebaskan tugasnya oleh pemerintah dan dihentikan sebagai KSAD. Demikian juga beberapa perwira "Pro-17 Oktober" lainnya mendapat sanksi yang sama. Pada tanggal 16 Desember 1952 Kolonel Bambang Sugeng yang pada saat menjelang timbulnya peristiwa itu juga di non-aktifkan oleh KSAD selaku komandan teritorial wilayah Jawa Timur, dan kemudian ditunjuk oleh pemerintah selaku KSAD yang baru untuk menggantikan kedudukan Kolonel A.H. Nasution.

Pengangkatan Kolonel Bambang Sugeng ini nampaknya mengandung prospek akan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut terutama mengenai keutuhan TNI, sebab antara menteri pertahanan Hamengku Buwono dengan KSAD Bambang Sugeng terdapat perbedaan yang besar di dalam menyelesaikan perpecahan dalam kubu TNI, maka pada tanggal 1 Januari 1953, Sultan Hamengku Buwono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Kemudian pada tanggal 31 Maret, dengan berbagai pertimbangan, pemerintah menggeser serta mengganti Sekretaris Jendral Menteri Pertahanan, yaitu Ali Budiardjo yang juga dikenal sebagai orang yang berhaluan PSI, dengan bekas Kolonel Hidayat, yaitu seorang perwira yang tidak tersangkut di dalam perpecahan TNI.

Pada tanggal 4 November 1953, pemerintahan Ali Sastroamidjojo mengeluarkan peraturan yang menghapus pos Kepala Staf Angkatan Perang yang pada masa itu dipegang oleh Mayor Jendral T.B. Simatupang. Karena adanya langkah-langkah yang terus dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh menteri pertahanan Iwa Kusumasumantri, dengan kecenderungan memperlebar keretakan tubuh militer, maka atas inisiatif dan usaha beberapa perwira TNI-AD baik yang "Pro 17 Oktober" seperti Kolonel Suprpto, Sutoko, S.Parmman maupun yang "Anti 17 Oktober" seperti Kolonel Zulkifli Lubis dan Kolonel Sapari mengadakan serangkaian pertemuan guna menciptakan kembali kesatuan TNI yang retak sejak peristiwa 17 Oktober 1952. Usaha ini mendapat dukungan dan dorongan yang besar dari Bambang Sugeng yang pada waktu itu otoritasnya banyak dilangkahi oleh Iwa Kusumasumantri di dalam mengambil *policy* mengenai hal-hal yang menyangkut persoalan intern TNI.

Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1955 berhasil dilangsungkan pertemuan di Yogyakarta dan pertemuan ini berakhir pada tanggal 25 Februari 1955 dengan menghasilkan suatu resolusi yang diterima oleh seluruh perwira yang hadir yang kemudian disahkan oleh KSAD Kolonel Bambang Sugeng. Pertemuan di Yogyakarta itu dikenal dengan sebutan RACO (*Rapat Collegiaal*). Raco ini menghasilkan piagam keutuhan Angkatan Darat. Hal ini tidaklah berarti bahwa perbedaan pendapat antara pemerintah (kabinet) dengan TNI-AD telah selesai. Ketika KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai KSAD pada bulan Mei 1955, pucuk pimpinan TNI- Angkatan Darat diserahkan kepada WKSAD Kolonel Zulkifli Lubis. KSAD Bambang Sugeng

mengundurkan diri dari jabatannya karena setelah selama tiga bulan agaknya kurang mampu melaksanakan resolusi piagam Yogya (hasil Raco) yang dipercayakan kepadanya dengan penuh konferensi.<sup>20</sup>

Untuk menduduki jabatan KSAD itu, kabinet berketepatan akan mengangkat salah seorang perwira dari "kelompok anti 17 Oktober". Kemudian kabinet segera mengajukan calon-calonnya kepada Dwi Tunggal Sukarno-Hatta, yaitu Kolonel Zukifli Lubis, Kolonel Sudirman (Komandan Territorium Jawa Timur), Kolonel Bambang Oetoyo (Sumatera Selatan). Akan tetapi menjelang akhir Mei, pimpinan TNI menegaskan bahwa pengisian dan pengangkatan KSAD harus didasarkan oleh senioritas dan kecakapan yang sejalan dengan kepentingan-kepentingan militer (piagam Yogya). Pernyataan pimpinan TNI itu berarti, bahwa Kolonel A.H. Nasution, Kolonel Simbolon, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Zukifli Lubis merupakan calon-calon yang paling besar kemungkinannya untuk diajukan.

Pada tanggal 10 Juni, kabinet Ali memutuskan untuk mengangkat Kolonel Bambang Oetoyo menjadi KSAD baru dengan pangkat Mayor Jendral. Pimpinan TNI menolak keputusan tersebut sebab pengangkatan itu melanggar ketentuan piagam yogyakarta. Kemudian, pada tanggal 27 Juni, Kolonel Zulkifli Lubis selaku PJ. KSAD memberitahukan kepada presiden Soekarno, bahwa dia akan melakukan boikot atas pengangkatan Bambang Oetoyo sekiranya keputusan kabinet tetap akan dilakukan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Muhaimin, hlm. 80

Pada tanggal 27 Juni, ketika pemerintah secara resmi mengangkat Kolonel Bambang Oetoyo dengan satu upacara pelantikan sebagai KSAD, pimpinan TNI dan para perwira yang diundang untuk menghadiri upacara itu memboikotnya atas perintah PJ.KSAD Zulkifli Lubis dan pada hari itu juga Kolonel Zulkifli Lubis menolak untuk menyerahkan otoritasnya selaku KSAD kepada Kolonel Bambang Oetoyo. Pemerintah, yaitu menteri pertahanan Iwa Kusuma Sumantri atas intruksi dari presiden Soekarno, segera bertindak melakukan pemecatan terhadap Lubis dari segala jabatannya. Tanggal 3 Juli, Ikatan Perwira Republik Indonesia (IPRI) yang diketuai oleh Kolonel Rudi Pringadi mengeluarkan statement yang berisi permintaan agar pengangkatan Bambang Oetoyo dibatalkan dan kemudian diganti oleh seorang perwira yang diangkat berdasarkan senioritas dan kapabilitas. Presiden Soekarno dan kabinetnya juga tetap pada pendiriannya dan berusaha mendapatkan dukungan dari perwira anti 17 Oktober.

Pada tanggal 13 Juli 1955, menteri Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1955, presiden Soekarno pergi ke luar negeri meninggalkan negara di dalam krisis politik, demikian hebatnya setelah gagal menyelamatkan kabinet. Oleh karena itu pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamidjoyo menyerahkan mandatnya kembali kepada pejabat presiden Mohammad Hatta. Sekalipun menurut mekanisme sistem politik yang ada kabinet Ali jatuh karena partai-partai politik dan parlemen, akan tetapi momentum jatuhnya kabinet Ali adalah karena Angkatan Dara.<sup>21</sup>



<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 81

Pada bulan Agustus 1955, terbentuk kabinet baru dengan perdana menteri Burhanuddin Harahap. Pada bulan ini juga, kabinet memberhentikan Bambang Oetoyo sebagai KSAD dan mencabut kembali atas pemecatan terhadap Lubis. Pada awal Oktober, markas besar Angkatan Darat mengajukan calon-calonnya sebagai KSAD berdasarkan piagam Yogya, yaitu Simbolon, Gatot Subroto dan Zulkifi Lubis. Untuk mengambil keputusan dari calon itu, kab.net merasa macet. Dalam kemacetan tersebut dan berdasarkan piagam Yogya, maka kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan dan mengajukan Kolonel A.H. Nasution yang dinon-aktifkan sejak Desember 1953 sebagai calon KSAD, disamping ketiga calon lainnya. Pencalonan itu disetujui pimpinan TNI. Pada tanggal 27 Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan mengangkat kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD baru, dan empat hari kemudian presiden Sukarno menandatangani pengangkatan itu dengan memberi pangkat Mayor Jendral.

Peristiwa 17 Oktober merupakan salah satu penyebab ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan TNI, khususnya Angkatan Darat. Rakyat beranggapan bahwa pemerintah dan TNI-AD tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka hanya mengutamakan atau mementingkan kepentingannya saja, «apalagi partai-partai politik yang ada. Hal ini hanya menimbulkan kekecewaan pada rakyat Indonesia.

Salah satu tuntutan dari pada demonstran pada tanggal 17 Oktober 1952 dipenuhi oleh pemerintah, yaitu dengan diadakannya pemilihan umum (pemilu). Hasil pemilu pada bulan September 1955 adalah dengan terbentuknya kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956, yaitu Kabinet Ali II dengan perdana menteri Mr. Ali Sastroamidjojo.

Pemilu yang diharapkan sebagai obat mujarab, akan tetapi setelah terbentuknya kabinet baru malah menimbulkan kekecewaan umum yang semakin besar terhadap pemerintahan. Situasi politik tidak menjadi baik dimana partai-partai yang ada masih selalu bertengkar, korupsi merajalela, ekonomi bertambah buruk dan demoralisasi menguasai segala bidang kehidupan.

Pada bulan Mei 1956, sebagai protes terhadap pemerintah pusat terjadi penyeludupan-penyeludupan dan perdagangan barter di luar Jawa, terutama di daerah Minahasa, Makasar dan Sumatera Utara. Penyeludupan ini dilakukan atas inisiatif dan perlindungan para penguasa militer setempat. KSAD A.H. Nasution memutuskan untuk datang *on the spot* menyaksikan hal tersebut di Minahasa pada pertengahan bulan Juli 1956, yaitu setelah awal Juli terjadi penyeludupan besar-besaran di teluk Nibung di bawah Kolonel Simbolon.<sup>22</sup> Namun demikian, pimpinan militer pusat di Jakarta tidak bisa melakukan tindakan apa-apa yang berarti, juga pemerintah.

Mulai bulan Agustus 1956, KSAD A.H. Nasution akan melaksanakan program pergeseran di antara para komandan teritorium, yaitu sebagai realisasi daripada rencana yang dibuatnya pada bulan Februari sesuai dengan isi piagam Yogya. Tetapi program Nasution ini ditentang oleh perwira-perwira yang bersangkutan, terutama yang posisi politik mereka tergeser yang justru, karena mereka merasa telah bersama-sama berhasil menghadapi tantangan pada bulan Juni 1955.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Muhaimin, hlm. 84

Pada tanggal 13 Agustus 1956, atas perintah Deputy KSAD Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Alexis Kawilarang menahan menteri luar negeri Ruslan Abdul Ghani dengan tuduhan terlibat dalam perkara korupsi yang dilakukan Lie Hok Thay (Direktur sebuah perusahaan Negara). Atas usaha perdana menteri Ali Sastroamidjojo dan KSAD A.H Nasution, penangkapan atas diri Ruslan itu digagalkan. Tindakan perdana menteri dan KSAD ini mendapat reaksi besar dari berbagai pihak terutama dari kalangan TNI sendiri. Pada bulan Desember 1956, prestasi kabinet mulai menurun semakin hebat dan sejak Januari 1957, Kabinet Ali terus menerus mendapat kritikan dan sorotan tajam sekali.

Kejadian di Jakarta semuanya itu telah mendorong daerah-daerah di luar Jawa untuk memperhebat tekanan-tekanannya. Gerakan di daerah-daerah ini diperhebat dengan perasaan sukuisme yang menganggap pemerintahan pusat hanya dipegang oleh orang-orang Jawa serta mementingkan kesejahteraan Jawa belaka. Dalam hal ini Mayor Jenderal A.H. Nasution telah dicap sebagai alat orang Jawa Soekarno dan Ali.

Perkembangan yang membahayakan, terutama bagi kesatuan TNI itu telah diusahakan oleh sekolah staf Kornando Angkatan Darat (SESKOAD) dan oleh IPRI agar tidak berlarut, terutama mengenai pertikaian antara Nasution dan Lubis. Akan tetapi pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956 telah memperhebat kekecewaan dan kebencian daerah-daerah di luar Jawa, terutama Sumatra terhadap pemerintah pusat dan khususnya terhadap presiden Soekarno.

Daerah-daerah di Sumatra tersebut (Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan), satupun tidak ada lagi yang bersedia mengakui Kabinet Ali dan pemerintah pusat umumnya yang telah dianggap telah melakukan korupsi, mensesentralisir kekuasaan pemerintah dan mengabaikan pembiayaan buat pembangunan daerah serta terlalu bersikap lemah terhadap kaum komunis.

Daerah-daerah yang bergolak itu (termasuk Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, disamping Sumatera) yang menuntut agar Hatta dikembalikan pada posisi politik yang dominan di dalam pemerintah.<sup>23</sup>

Pemerintah Ali menanggapi kejadian di Sumatra itu dengan melakukan tekanan-tekanan militer dan blokade ekonomi. Hal ini adalah sesuai dengan *policy* yang digariskan oleh presiden Soekarno yang mempergunakan Angkatan Udara untuk melaksanakan *policy* kabinet. Tetapi KSAD Nasution dan pimpinan TNI-AD lainnya melakukan tindakan yang lebih lunak, yaitu dengan melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang bergolak itu dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pergolakan di daerah.

Tindakan Nasution dalam menghadapi pergolakan daerah cenderung mengarah pada sifat militer dari pada bersifat politis, hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan *policy*-nya untuk memelihara *status quo* dalam hal sipil-militer mengingat keadaan TNI-AD masih dalam posisi politik yang lemah.

## B. Dampak dalam Bidang Politik

Pada masa periode 1957-1959, yang disebut sebagai suatu masa transisi di dalam kehidupan politik di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia melalui

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 90

Mayor Jendral A.H. Nasution sebagai KSAD, menitikberatkan tindakannya yang mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan kerapuhan politis yang merupakan kelemahan yang paling fundamental yang ada pada TNI. Selain itu, Jendral A.H. Nasution juga menitikberatkan dalam usahanya untuk mendapatkan *legitimacy* atau "dasar hukum" bagi TNI untuk melakukan peranan-peranan non-militer, dalam hal ini peran politik yang selama ini belum dimiliki TNI.

Pada bulan Oktober 1956, presiden Soekarno menawarkan suatu alternatif lain untuk mengatasi krisis politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu berupa suatu gagasan sistem pemerintahan lain yang dinamainya "Demokrasi Terpimpin" dengan formula atau konsepsinya sendiri menggantikan demokrasi sebelumnya, yaitu Demokrasi Liberal.

Untuk itu presiden Soekarno mengusulkan agar, pertama dibentuk kabinet baru yang mencakup semua partai besar termasuk PKI dan kedua, dibentuk suatu badan penasehat tertinggi yang anggotanya terdiri dari seluruh wakil golongan fungsional di dalam masyarakat. Dalam mewujudkan usulnya itu dengan konkrit Soekarno kemudian meminta segera dibentuk kabinet "Gotong Royong", dan di sampingnya berdiri "Dewan Nasional".

Konsepsi Presiden itu ternyata bukan saja tidak berhasil mendapat dukungan mayoritas, tetapi juga tidak berhasil mencapai konsensus. Partai-partai politik menyambutnya dengan suara pro dan kontra. Sementara itu, pimpinan pusat TNI bersikap diam terus sehubungan dengan gagasan politik dari konsepsi Soekarno. Tetapi apa yang dikehendaki TNI jelas bagi Soekarno,

yaitu "lebih banyak kekuasaan untuk tentara tanpa secara langsung menentang presiden".

Pada tanggal 14 Maret 1957, sesaat sebelum menyerahkan mandatnya kepada presiden, perdana menteri Ali Sastroamidjojo menandatangani sebuah dekrit yang menyatakan "keadaan darurat perang" untuk seluruh negara. Pada hari itu juga, presiden Soekarno segera mengumumkan bahwa negara dalam keadaan darurat atau bahaya perang atau "S.O.B" (Staat Van Oolog en Beleg).

S.O.B inilah yang memberikan dasar hukum legitimasi kepada militer untuk melakukan tindakan-tindakan non-militer, terutama dalam hal ini adalah melakukan peranan politik. S.O.B dengan demikian memberikan kekuasaan yang "lega" kepada penguasa militer di daerah-daerah untuk melakukan tindakan politik dan meletakkan kekuasaan pemerintahan sipil di bawah militer.

Hanya di Jakarta saja penguasa Militer tidak dapat mengimbangi pengaruh kekuasaan politik dan kekuatan karismatik di miliki oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi Militer. Tetapi di daerah-daerah lain teristimewa di luar Jawa, SOB ini telah digunakan sebaik-baiknya oleh para panglima Militer setempat guna meraih otoritas kekuasaan administrasi pemerintahan daerah rencana semaksimal mungkin dari penguasa sipil.

Sementara itu nasution dengan pimpinan TNI di pusat kini bertindak dengan sifat betul-betul politis, dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum diberlakukannya SOB.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 97

Setelah Kabinet Ali Kedua jatuh, presiden Soekarno berhasil membentuk kabinet yang diinginkan dengan Ir. Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri dan merangkap sebagai menteri pertahanan yang diberi nama "Kabinet Karya" dengan program-program dari Soekarno. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pembentukan kabinet Djuanda oleh Soekarno, dan dengan cara yang begitu telah mengurangi peran parlemen dan partai dalam perkembangan yang setara dengan naiknya peranan politik Presiden dan TNI-AD.

Pada bulan Mei, sesuai dengan salah satu programnya, kabinet Djuanda dengan memakai dasar hukum S.O.B membentuk Dewan Nasional. Dewan ini tidak hanya sekedar membantu kabinet, tetapi dalam pandangan presiden Soekarno merupakan "refleksi masyarakat Bangsa Indonesia". Pada tanggal 12 Juli, presiden Soekarno selaku ketua Dewan Nasional melantik badan negara baru itu dengan wakil-wakil dari militer dan Kepolisian Negara, antara lain KSAD Jendral Mayor A.H. Nasution, KSAU Komodor Suryadarma, KSAL Laksaman Madya Subijakto, dan Kepala Kepolisian Negara Sukanto. Dan sejak saat inilah militer mempunyai wakil dalam suatu lembaga pemerintahan.

Dengan adanya S.O.B ini, pimpinan TNI-AD di bawah Jendral Nasution mendapatkan kesempatan yang besar buat TNI untuk lebih dalam memasuki arena politik. Pada bulan Juni 1957, sebagai langkah pertama dibentuk suatu organisasi bernama Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKS-PM) dengan pimpinan Letnan Kolonel Pamuhardjo. Kemudian pada masa

berikutnya dibentuk BKS-Sipil Militer, yang anggotanya adalah buruh dan tani (BKS-Bumil dan BKS-Tamil).<sup>25</sup>

Dari satu segi, adanya organisasi-organisasi itu merupakan usaha Nasution untuk merenggangkan penguasaan partai terhadap "kelompok fungsional", sehingga akan terbukalah komunikasi politik untuk membawa kelompok-kelompok fungsional tersebut ke bawah pengaruh TNI. Namun usaha Nasution ini tidak berhasil dengan baik. Usaha Nasution ini berhasil dengan baik hanya pada kelompok organisasi-organisasi veteran, sejak masa revolusi telah diorganisir, yang sejak masa revolusi telah diorganisir di bawah pengaruh partai-partai. Pada bulan Januari 1957, usaha melebur beberapa organisasi veteran itu telah dimulai ke dalam suatu organisasi legiun veteran dengan diketuai oleh Kolonel Rudi Pringadi. Partai-partai memprotes tindakan Jendral Nasution itu, terutama PKI yang memiliki dan menguasai organisasi veteran yang amat kuat, yaitu PERBEPSI. Tetapi protes itu tidak dihiraukan dan Nasution mengaitkan veteran dengan TNI.

Pada bulan Januari 1958, Nasution berhasil membentuk suatu organisasi dengan nama "Front Nasional Pembebasan Irian Barat"(FNPIB) dengan basis organisasi-organisasi "Badan Kerjasama Sipil-Militer" itu. Sejak saat itu Nasution berusaha memperluas FNPIB secara Nasional dan berbagai cabang-cabangnya. Namun FNPIB inipun tidak efektif dan tidak berhasil dijadikan alat politik bagi TNI oleh Nasution. Hal ini disebabkan karena partai-partai politik terutama PKI menghambatnya dengan melalui beberapa pimpinan FNPIB di bawah pengaruh PKI.

Gagasan dari presiden Soekarno untuk mengatasi krisis yang sedang mengancam dengan menggunakan sistemnya yang dinamakan Demokrasi

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 100.

Terpimpin ternyata tidak berhasil mengatasi krisis yang sedang berkecamuk, dalam hal ini adalah pergolakan daerah. Bahkan dengan dilaksanakannya sistem dari Soekarno yang ditopang oleh TNI, pergolakan daerah semakin menjadi-jadi.

Kejadian meningkat terus pada bulan November dan Desember, antara lain percobaan pembunuhan pada presiden, pemogokan di perusahaan-perusahaan Belanda. Selain itu, pada bulan Februari 1958 terjadi pembentukan dan pemberontakan PRRI di Padang dengan perdana menteri Mr. Syafruddin Prawiranegara, pembentukan Dewan Manguni di Sulawesi Utara di bawah pimpinan Letnan Kolonel D. Soniba dan pemberontakan Permesta di bawah pimpinan Letnan Kolonel H. N. V. Sumual.

Untuk menangani pergolakan di daerah ini maka pada tanggal 7 Maret 1958, dilancarkan serangan terhadap Padang dengan persiapan yang sudah lama dilakukan oleh KSAD Nasution. Dalam serangan ini kota Padang dan Bukittinggi dapat dikuasai dan direbut kembali oleh TNI. Hal ini bagi intern TNI sedikitnya mempunyai dua akibat. Pertama, tersingkirnya beberapa perwira seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Kolonel Sumual dan Kolonel Husein yang merupakan perwira kelompok radikal. Kedua, TNI memiliki dan mendapatkan posisi yang lebih kuat didalam pemerintah, ditambah dengan berlakunya SOB.

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

Pada bulan Agustus 1958, usulan Nasution di Dewan Nasional agar UUD '45 diberlakukan kembali, pada mulanya tidak mendapat tanggapan yang positif dari Presiden Soekarno khusus nya sebagai ketua Dewan pada umumnya.

Pertimbangan Soekarno itu mungkin karena Soekarno tidak merasa mampu memikul beban tanggung jawab jabatan Presiden di bawah UUD '45 dan mungkin karena takut tidak bisa mengimbangi dan menguasai peranan TNI selama peranan partai-partai politik belum lemah.

Pada tanggal 19 Februari 1959 Kabinet karya akhirnya berhasil merumuskan keputusan-keputusan penting. Kabinet telah sampai pada rumusan mendasar mengenai sistem politik Demokrasi Terpimpin, dengan sebuah keinginan untuk kembali ke UUD '45.

Sementara itu status militer dalam pentas politik telah pula mendapatkan perhatian yang besar. Pembahasan kabinet tentang golongan fungsional bahkan boleh dibilang secara khusus lebih ditekankan pada kedudukan dan peranan politik militer. Keputusan final kabinet akhirnya menyebutkan sebagaimana keputusan Dewan Nasional, bahwa militer dimaksukan sebagai salah satu golongan fungsional, yaitu golongan fungsional Angkatan Bersenjata. Golongan ini terdiri dari AD, AL, AU, Kepolisian serta OKD dan OPR. Bersama golongan fungsional yang lain, golongan fungsional Angkatan Bersenjata akan dimaksukan dalam komposisi keanggotaan DPR, DPA, dan MPK.

Keanggotaan golongan fungsional Angkatan Bersenjata di DPR dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh presiden dan akan berjumlah 35 orang atau 15,5 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPR. Kabinet akhirnya memutuskan bahwa gagasan Nasution kesemuanya itu akan diletakkan dalam kerangka UUD 1945.<sup>26</sup>

Hasil akhir sidang Kabinet karya disampaikan dalam rapat pleno DPR tanggal 2 Maret 1959. Dengan panjang lebar dijelaskan bahwa militer harus diakui sebagai kekuatan politik, dan status paling tepat untuk itu adalah sebagai golongan fungsional. Sebagai golongan fungsional militer akan mempunyai hak untuk duduk di lembaga-lembaga kenegaraan seperti DPR, DPA, dan MPR. Secara jelas Juanda juga menyebutkan bahwa militer sebagai kekuatan sosial politik bahkan telah melontarkan ide kembali ke UUD 1945.<sup>27</sup>

Pada perkembangan awalnya golongan fungsional belum sepenuhnya dalam suatu kerangka dasar konstitusional yang jelas dan pasti. Dan sebagai kekuatan politik, sebelum sepenuhnya dimasukkan sebagai wadah bagi militer dalam memberikan partisipasi politiknya.

Sementara sekarang golongan fungsional secara jelas dan pasti diletakkan dalam kerangka konstitusional UUD 1945. Kemudian di dalamnya tercakup pula militer, dan bahkan status ini telah menjadi dasar yang tepat bagi partisipasi yang luas dari golongan tentara dalam melakukan peranan-peranan non-militernya. Penempatan militer dalam institusi-institusi kenegaraan bahkan juga telah disebutkan seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

---

<sup>26</sup> Hendri Supriyatmono, *Nasution Dwifungsi ABRI dan Kontribusi ke Arah Reformasi Politik*, Yogyakarta, Sebelas Maret University Press, 1994, hlm. 124.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 125

Nasution dengan demikian bahkan tidak saja telah berhasil menetapkan legitimasi konstitusional bagi keterlibatan militer dalam kehidupan politik, bahkan juga berhasil menempatkan posisi dan fungsi politik golongan tentara dalam kerangka *Mainstream* politik yang ada, dan dengan demikian militer akan menjadi kekuatan politik yang masuk ke dalam sistem, sehingga partisipasi politiknya menjadi legal. Dalam sebuah pidatonya Nasution menyebutkan bahwa keberadaan militer sebagai golongan fungsional Angkatan Bersenjata akan dapat disesuaikan dalam sistem Demokrasi Terpimpin, dan setelah berlakunya kembali UUD 1945, maka militer diakui dan disahkan secara resmi sebagai golongan fungsional atau golongan Karya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 127

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dilihat dari uraian yang ada dalam bab I-V, maka peristiwa 17 Oktober 1952, dengan adanya sistem Demokrasi Parlementer maka kabinet yang ada selalu berganti-ganti. Rakyat merasa kecewa dengan sistem pemerintahan yang seperti itu dimana kabinet-kabinet yang ada selalu tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Ketegangan dimulai pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo, dimana pada kabinet ini dimulai timbul konflik antara kaum politis (sipil) dengan militer. Karena keadaan yang semakin buruk pada tanggal 17 Oktober 1952, rakyat mengadakan demonstrasi untuk menuntut Presiden agar membubarkan parlemen dan segera diadakan pemilihan umum. Begitu juga dengan TNI, mendesak Presiden Soekarno agar segera membubarkan parlemen yang ada supaya tidak ada kekacauan di mana-mana dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah.

Sebagai dampak dari peristiwa 17 Oktober 1952, maka pada tanggal 5 Desember 1952 A.H. Nasution dibebaskan tugasnya oleh pemerintah dan diberhentikan sebagai KSAD. Tetapi pada tanggal 27 Oktober 1955, Kabinet Burhanuddin mengangkat kembali A.H. Nasution sebagai KSAD menggantikan Bambang Oetoyo, dan empat hari kemudian Presiden Soekarno menandatangani pengangkatan itu dengan memberi pangkat Mayor Jenderal. Dampak dari peristiwa 17 Oktober 1952 ini rakyat menjadi tidak percaya lagi pada pemerintahan, di samping itu terjadi pergolakan-pergolakan di daerah Sulawesi Utara, Selatan dan

Sumatera, dimana hal ini harus segera diatasi oleh kolone. Nasution sebagai KSAD yang baru.

Dalam menghadapi pergolakan yang ada di daerah tersebut, A.H. Nasution mengatasinya dengan sikap yang lunak yaitu dengan mengunjungi daerah-daerah yang bergejolak dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin pergolakan di daerah tertentu.

Penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952 memerlukan waktu yang panjang dalam memperjuangkan kepentingan TNI dalam bidang politik, A.H. Nasution mengusulkan agar TNI harus diakui sebagai golongan fungsional yang dimasukkan dalam kategori Angkatan Bersenjata Republik Indonesia termasuk didalamnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polisi dan Veteran, OKD, OPR. Disamping itu A.H. Nasution juga mempunyai peranan yang penting dalam percaturan politik Indonesia sebagai anggota Dewan Nasional, Nasution mengusulkan dalam hasil akhir rapat pleno menyebutkan bahwa militer sebagai kekuatan sosial politik bahkan telah melontarkan ide kembali ke UUD 1945. Sehingga dengan demikian A.H. Nasution telah berhasil meletakkan legitimasi konstitusional bagi keterlibatan militer dalam kehidupan politik. Serta menempatkan posisi dan fungsi politik golongan tentara, dan dengan demikian militer akan menjadi kekuatan politik.

Demikian pembahasan penyusunan makalah tentang Peranan A.H. Nasution dalam bidang militer politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Yahya, Muhaimin, 1982, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, A.H. 1982, *Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda, Jilid 1*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- , 1983, *Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Panceroaba 1, Jilid 3*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- , 1966, *Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata*, Jakarta: Mega Bookstark.
- Notosusanto, Nugroho, *Pejuang dan Prajurit*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Ozon, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Supriyatmono, Hendri, 1994, *Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soebagijo, I.N. 1979, *Wilopo 70 Tahun*, Jakarta: Gunung Agung.

### SILABUS KBK

Nama Sekolah : SMA  
Mata Pelajaran : Sejarah  
Kelas : 3 (tiga) semester V  
Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (Dua kali Pertemuan @ 2 x 45)

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompetensi Dasar     | Kemampuan mengekspresikan dan menjelaskan peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hasil Belajar        | Mendiskripsikan proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952 dan penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Indikator            | Menjelaskan peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tujuan Pembelajaran  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mampu menjelaskan tentang proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.</li><li>2. Mampu menjelaskan dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.</li><li>3. Mampu menjelaskan penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.</li><li>4. Mampu menjelaskan manfaat dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.</li></ol> |
| Langkah Pembelajaran | Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua tahap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Langkah Pembelajaran</p> | <p>Kegiatan pembelajaran dilakukan dalam dua tahap skenario pengalaman belajar siswa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di luar kelas <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengalaman belajar siswa melalui studi pustaka (buku, koran, majalah) sehubungan <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952,</li> <li>(b) dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952,</li> <li>(c) penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.</li> </ol> </li> <li>b. Sebelum siswa melakukan tugas, guru membagi kelompok antara lain : (1) kelompok proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952, (2) kelompok dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952, (3) Kelompok penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.</li> </ol> </li> </ol> <p>Tugas siswa dalam bentuk lembar kerja, diantaranya berisikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) a. Judul laporan : Proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.</li> <li>b. Isi laporan singkat : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi masyarakat pada waktu itu.</li> <li>- Pertentangan antara TNI-AD dan parlemen</li> </ul> </li> <li>c. Identifikasi fakta-fakta tentang kapan peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi dan fakta</li> </ol> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>tentang proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.</p> <p>d. Deskripsi alasan-alasan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan keterlibatan TNI-AD dalam peristiwa 17 Oktober 1952.</p> <p>e. Kesimpulan</p> <p>Rekonstruksi tentang proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang melibatkan pertentangan antara TNI-AD dan parlemen.</p> <p>(2) a. Judul Laporan : Dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.</p> <p>b. Isi laporan singkat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak dalam bidang militer</li> <li>- Dampak dalam bidang politik</li> </ul> <p>c. Identifikasi kaitan peranan A.H. Nasution dengan peristiwa 17 Oktober 1952.</p> <p>d. Deskripsi peranan A.H. Nasution diberbagai bidang</p> <p>e. Kesimpulan</p> <p>A.H. Nasution berperan dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.</p> <p>2. Dikelas</p> <p>a. Apersepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru membuka pelajaran dengan menanyakan kesiapan tugas yang akan didiskusikan, kemudian siswa menjawab.</li> <li>- Guru menanyakan secara singkat proses penyusunan laporan dari kelompok, dan</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>setiap kelompok memberikan penjelasan proses penyusunan laporan kelompok.</p> <p>b. Kegiatan inti</p> <p>Mempresentasikan hasil laporan kelompok secara bergantian. Setelah presentasi kelompok dengan disertai diskusi dan tanya jawab, guru memaparkan materi, menyempurnakan, mengklarifikasi dan memperkuat hasil laporan dengan cara ceramah, Tanya jawab, diskusi dan penegasan oleh guru.</p> <p>c. Kesimpulan yang dilakukan oleh guru sebagai moderator dan fasilitator dengan menyatakan bukan satu-satunya kebenaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Proses tentang terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952.</li> <li>2) Dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952.</li> <li>3) Penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952.</li> </ol> |
| Sumber Pembelajaran | <p>Sumber Pembelajaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A. Yahya, Muhaimin, 1982, <i>Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966</i>, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.</li> <li>- Depdikbud, 1990, <i>Kamus Besar Bahasa Indonesia</i>, Jakarta: Balai Pustaka.</li> <li>- Nasution, A.H. 1982, <i>Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda, Jilid 1</i>, Jakarta: PT. Gunung Agung.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- -----, 1983, <i>Memenuhi Panggilan Tugas: Masa Pancaroba I, Jilid 3</i>, Jakarta: PT. Gunung Agung.</li> <li>- -----, 1966, <i>Sejarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata</i>, Jakarta: Mega Bookstark.</li> <li>- Notosusanto, Nugroho, <i>Pejuang dan Prajurit</i>, Jakarta: Sinar Harapan.</li> <li>- Ozon, 1990, <i>Ensiklopedi Nasional Indonesia</i>, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka</li> <li>- Supriyatmono, Hendri, 1994, <i>Nasution, Dwifungsi ABRI dan Kontribusi Ke Arah Reformasi Politik</i>, Surakarta: Sebelas Maret University Press.</li> <li>- Soebagijo, I.N. 1979, <i>Wilopo 70 Tahun</i>, Jakarta: Gunung Agung.</li> </ul> |
| Penelitian | <p>a. Penilaian Kognitif</p> <p>Penilaian ini dilakukan dengan post-tes yaitu membuat pertanyaan yang tidak menguag pengalaman belajar. Cara yang digunakan yaitu melalui tes uraian bebas (buku-buku) dan untuk penskoran, maka dibuat rambu-rambu jawaban yang akan dijadikan sebagai acuan.</p> <p>b. Penilaian Efektif</p> <p>Penilaian ini dilakukan dengan lembar pengamatan individual selama proses pembelajaran berlangsung, baik berupa "komentar" atau dalam bentuk pengamatan.</p> <p>c. Penilaian Portofolio</p> <p>Berupa laporan kerja kelompok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi tugas pada siswa berupa makalah</li> </ul>                                   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>kemudian dikumpulkan dan selanjutnya dipersentasikan di depan kelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi pertanyaan pada siswa, kemudian siswa menjawab pertanyaan dari guru sehingga dapat menambah nilai siswa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| Alat Evaluasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jelaskan proses terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952?</li> <li>2. Jelaskan mengenai dampak dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952?</li> <li>3. Jelaskan bagaimana penyelesaian peristiwa 17 Oktober 1952?</li> <li>4. Jelaskan bagaimana manfaat yang kita ambil dari peranan A.H. Nasution dalam bidang militer dan politik pada peristiwa 17 Oktober 1952?</li> </ol> |

Yogyakarta,

2004

Guru Bidang Studi

Ida Rosana

Format lembar pengamatan sikap siswa

| No | Indikator Sikap | Kerja Sama | Pembagian Tugas | Tanggung Jawab | Tanggung Rasa | Penguasaan Materi | Mutu Presentasi | Nilai Rata-rata |
|----|-----------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|    | Nama Siswa      |            |                 |                |               |                   |                 |                 |
| 1. |                 |            |                 |                |               |                   |                 |                 |
| 2. |                 |            |                 |                |               |                   |                 |                 |
| 3  |                 |            |                 |                |               |                   |                 |                 |

Skor untuk masing-masing sikap di atas dapat berupa angka. Akan tetapi, pada tahap akhir tersebut dirata-rata dan dikonversikan ke dalam bentuk angka kualitatif.

Skala penilaian dibuat dengan rentangan dari 1 sampai dengan 5. Penafsiran angka-angka tersebut adalah sebagai berikut : 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; dan 5 = sangat baik.

